



LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2019

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU SAPI POTONG PADANG MENGATAS
018.06.0800.239434.000.KD

Jl. Padang Mengatas PO BOX 03 Payakumbuh , Sumatera Barat

Telp.0752.759315 Fax : 0752.759369

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2019**

BPTU SP Padang Mengatas
Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2019

Padang Mengatas, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU SP Padang Mengatas adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

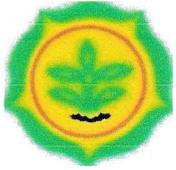
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU SP Padang Mengatas. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lima Ruluh Kota, 30 September 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,


Ir. Irwandi, MP
NIP. NIP.196212041989031003

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
B.2. Belanja	24
B.3. Belanja Pegawai	25
B.4. Belanja Barang	25
B.5. Belanja Modal	27
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	28
C.1.2. Persediaan	28
C.2. Aset Tetap	29
C.2.1. Tanah	29
C.2.2. Peralatan dan Mesin	29
C.2.3. Gedung dan Bangunan	30
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.4. Aset Lainnya	31
C.4.1. Aset Lain-lain	31
C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	32
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.5.2. Uang Muka dari KPPN	33
C.6. Ekuitas	33
C.6.1. Ekuitas	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	34
D.2. Beban Pegawai	34
D.3. Beban Persediaan	35
D.4. Beban Barang dan Jasa	36
D.5. Beban Pemeliharaan	37
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	39

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1. Ekuitas Awal	42
E.2. Surplus/Defisit-LO	42
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	42
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	42
E.4. Transaksi Antar Entitas	42
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	43
E.5. Ekuitas Akhir	43
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	44



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG
PADANG MENGATAS**

Jl.Raya Payakumbuh–Lintau Km. 9 Pekan Sabtu Kec. Luak Kab. Lima puluh Kota
Kotak Pos 03,Payakumbuh 26201

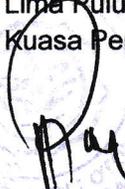
Telepon 0752 - 759315, Faksimile 0752 - 759369 e-mail: bptu_patas@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh Kota, 30 September 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,


Ir. Irwandi, MP

NIP. NIP.196212041989031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.087.869.688,00 atau mencapai 261,91% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.178.962.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.917.013.234,00 atau mencapai 14,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp66.462.211.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2019.

Nilai Aset per 30 September 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp172.921.682.697,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.162.669.968,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp169.759.012.729,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp140.000.000,00 dan Rp172.781.682.697,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2019 adalah sebesar Rp2.953.007.798,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.683.028.636,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.730.020.838,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp313.200.366,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.416.820.472,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp173.823.753.205,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.416.820.472,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-454.393.582,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.829.143.546,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2019 adalah senilai Rp172.781.682.697,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 SEPTEMBER 2019 dan 30 SEPTEMBER 2018**

Uraian	Catatan	30 September 2019			30 September 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.178.962.000,00	3.087.869.688,00	261,91	3.187.828.969,00
Jumlah Pendapatan		1.178.962.000,00	3.087.869.688,00	261,91	3.187.828.969,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	5.264.296.000,00	3.994.125.918,00	75,87	3.875.786.078,00
Belanja Barang	B.4.	61.197.915.000,00	5.922.887.316,00	9,68	5.651.195.614,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0,00	521.718.390,00
Jumlah Belanja		66.462.211.000,00	9.917.013.234,00	14,92	10.048.700.082,00

II. NERACA

**BPTU SP PADANG MENGATAS
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	30 September 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	140.000.000,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	3.022.669.968,00	1.838.456.435,00
Jumlah Aset Lancar		3.162.669.968,00	1.838.456.435,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	136.938.198.000,00	136.938.198.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10.092.774.232,00	10.092.774.232,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.257.711.300,00	24.752.361.300,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	11.067.344.000,00	11.067.344.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-12.597.014.803,00	-10.902.174.601,00
Jumlah Aset Tetap		169.759.012.729,00	171.948.502.931,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	326.123.000,00	386.123.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-326.123.000,00	-341.723.000,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	44.400.000,00
Jumlah Aset		172.921.682.697,00	173.831.359.366,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0,00	7.606.161,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	140.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		140.000.000,00	7.606.161,00
Jumlah Kewajiban		140.000.000,00	7.606.161,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	172.781.682.697,00	173.823.753.205,00
Jumlah Ekuitas		172.781.682.697,00	173.823.753.205,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		172.921.682.697,00	173.831.359.366,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 dan 30 SEPTEMBER 2018**

Uraian	Catatan	30 September 2019	30 September 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	2.953.007.798,00	3.147.089.572,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.953.007.798,00	3.147.089.572,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.992.810.598,00	3.875.786.078,00
Beban Persediaan	D.3.	726.328.643,00	1.430.318.527,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.577.552.493,00	1.813.188.971,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.286.527.217,00	1.386.885.459,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.320.313.065,00	895.971.359,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	236.500.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.779.496.620,00	1.834.114.902,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	0,00	-202.700,00
JUMLAH BEBAN		10.683.028.636,00	11.472.562.596,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7.730.020.838,00	-8.325.473.024,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	134.676.890,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	178.545.306,00	2.072.215.101,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	21.830,00	88.034.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		313.200.366,00	1.984.181.101,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-7.416.820.472,00	-6.341.291.923,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 dan 30 SEPTEMBER 2018**

Uraian	Catatan	30 September 2019	30 September 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	173.823.753.205,00	174.440.025.474,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.416.820.472,00	-6.341.291.923,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-454.393.582,00	-2.218.545,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-454.393.582,00	-2.218.545,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6.829.143.546,00	6.860.871.113,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	172.781.682.697,00	174.957.386.119,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU SP Padang Mengatas

Pada tanggal 24 Mei 2013 Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas Berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jl. Padang Mengatas Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota. PO BOX. 03 Payakumbuh 26201.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, Seksi Prasarana dan Sarana Teknis, Seksi Informasi dan Jasa Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Visi

Menjadi Pusat Penghasil Bibit Unggul Sapi Potong Nasional.

2. Misi

- a. Meningkatkan Populasi Sapi Potong.
- b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Bibit Sapi Potong.
- c. Menyediakan Bibit Unggul Sapi Potong yang Bersertifikat.
- d. Melakukan Distribusi dan Pemasaran Bibit Unggul Sapi Potong.
- e. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Aparatur dan Pelaku Usaha Sapi Potong.
- f. Meningkatkan Pelayanan Teknis, Distribusi dan Pemasaran.
- g. Menerapkan Inovasi Teknologi Sapi Potong.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Bibit Sapi Potong.
- b. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan.
- c. Meningkatkan Kemampuan Sumberdaya Manusia Perbibitan.
- d. Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Balai

4. Sasaran

- a. Penyediaan Benih dan Bibit Sapi Potong dalam jumlah yang cukup dan berkualitas secara berkelanjutan.
- b. Optimalisasi Fungsi Kelembagaan Perbibitan.
- c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Perbibitan (peternak, petugas dll).
- d. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Balai.

5. Strategi

- a. Pembinaan Perbibitan Ternak di wilayah Sekitar Balai.
- b. Mendorong Usaha-usaha Pembibitan Ternak Rakyat di wilayah sekitar Balai.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Perbibitan melalui Pelatihan, Magang, Studi Banding dll.

6. Kebijakan

- a. Pengelolaan dan Peningkatan Mutu dan Jumlah Bibit Sapi potong.
- b. Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan Perbibitan
- c. Penguatan SDM Perbibitan
- d. Promosi dan Membangun Citra (brand image) Bibit Ternak.

7. Fungsi

- a. Penyusunan Program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
- c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul
- d. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul
- e. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah
- f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul
- g. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
- h. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan
- i. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak
- j. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak

- k. Pemberian informasi, Dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak
- l. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul
- m. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul
- n. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul
- o. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU HPT

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU SP Padang Mengatas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU SP Padang Mengatas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTU SP Padang Mengatas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTU SP Padang Mengatas yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTU SP Padang Mengatas telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. DIPA BPTU HPT Padang Mengatas TA 2019 dengan No. SP-DIPA-018.06.2.239434/2019 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 84.000.347.000 dan telah dilakukan revisi dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA ke 1 pada tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai Rp78.129.167.000,00.
- Revisi DIPA ke 2 pada tanggal 31 Maret 2019 dengan nilai Rp78.129.167.000,00.
- Revisi DIPA ke 3 pada tanggal 20 Mei 2019 dengan nilai Rp78.129.167.000,00.
- Revisi DIPA ke 4 tanggal 14 Agustus 2019 dengan nilai Rp66.462.211.000.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.178.962.000,00	1.178.962.000,00
Jumlah Pendapatan	1.178.962.000,00	1.178.962.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.224.296.000,00	5.224.296.000,00
Belanja Lembur	40.000.000,00	40.000.000,00
Belanja Barang Operasional	584.889.000,00	698.769.000,00
Belanja Barang Non Operasional	4.512.293.000,00	3.575.363.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.254.375.000,00	2.254.375.000,00
Belanja Jasa	367.919.000,00	472.919.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.956.925.000,00	2.955.675.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.339.650.000,00	2.885.171.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	66.420.000.000,00	48.355.643.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja	84.000.347.000,00	66.462.211.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp3.087.869.688,00 atau mencapai 261,91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.178.962.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.178.962.000,00	3.087.684.688,00	261,90
Pendapatan Lain-lain	0,00	185.000,00	0,00
Jumlah	1.178.962.000,00	3.087.869.688,00	261,91

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -3,14% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTU SP Padang Mengatas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	41.488.443,00	- 100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.087.684.688,00	3.146.140.229,00	-1,86
Pendapatan Lain-lain	185.000,00	200.297,00	-7,64
Jumlah	3.087.869.688,00	3.187.828.969,00	-3,14

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terdiri dari :

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya yang berasal dari penjualan ternak dan bibit rumput.
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang berasal dari hasil lelang BMN
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas.
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi berasal dari sewa mess dan aula.

Pendapatan lain-lain berasal dari penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.917.013.234,00 atau 14,92% dari anggaran belanja sebesar Rp66.462.211.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 September 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.264.296.000,00	3.994.871.517,00	75,89
Belanja Barang	61.197.915.000,00	5.924.377.316,00	9,68
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	66.462.211.000,00	9.919.248.833,00	14,92
Pengembalian Belanja		-2.235.599,00	0,00
Total Belanja	66.462.211.000,00	9.917.013.234,00	14,92

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -1,31% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu belanja barang yang lebih besar pada TA 2019 karena adanya kegiatan BEKERJA, diikuti belum adanya realisasi untuk belanja 526 pada kegiatan bekerja dimana sebagian besar pagu belanja TA 2019 berada pada kegiatan BEKERJA

Pengembalian belanja senilai Rp2.235.599,00 terdiri atas

1. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS melalui potongan SPM No. 44/KU.130/F2.C/04/2019 senilai Rp.6,00 akun 1787.994.511119
2. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS melalui potongan SPM No. 72/KU.130/F2.C/04/2019 senilai Rp.5.293,00 akun 1787.994.511119
3. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS melalui potongan SPM No. 150/KU.130/F2.C/06/2019 senilai Rp.116,00 akun 1787.994.511119
4. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS melalui potongan SPM No. 165/KU.130/F2.C/07/2019 senilai Rp.184,00 akun 1787.994.511119
5. Pengembalian belanja tunjangan umum PNS melalui Potongan SPM No. 150/KU.130/F2.C/06/2019 senilai Rp.740.000,00 akun 1787.994.511151
6. Pengembalian belanja perjalanan dinas Verifikasi RTM pada SPM No. 37/KU.130/F2.C/03/2019 (kelebihan pembayaran uang harian) senilai Rp.450.000,00 akun 1785.404.524111

7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Ir. Irwandi, MP dkk ke Jambi SPT No. 1376/TU.320/F2.C/07/2019 (kelebihan pembayaran penginapan) senilai Rp.1.040.000,00 akun1787.950.524111

Perbandingan Realisasi Belanja
30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	.%
Belanja Pegawai	3.994.125.918,00	3.875.786.078,00	3,05
Belanja Barang	5.922.887.316,00	5.651.195.614,00	4,81
Belanja Modal	0,00	521.718.390,00	-100,00
Total Belanja	9.917.013.234,00	10.048.700.082,00	-1,31

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.994.125.918,00 dan Rp3.875.786.078,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,05% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan jumlah pegawai berupa CPNS sebanyak 7 orang pada Tahun 2019

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.994.871.517,00	3.854.313.058,00	3,65
Belanja Lembur	0,00	22.195.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.994.871.517,00	3.876.508.058,00	3,05
Pengembalian Belanja Pegawai	-745.599,00	-721.980,00	3,27
Jumlah Belanja	3.994.125.918,00	3.875.786.078,00	3,05

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.922.887.316,00 dan Rp5.651.195.614,00. Realisasi

belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,81% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu belanja barang lebih besar pada TA 2019 yang diikuti dengan besarnya realisasi belanja barang tersebut.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	456.374.450,00	380.549.850,00	19,93
Belanja Barang Non Operasional	852.326.450,00	1.156.270.000,00	-26,29
Belanja Barang Persediaan	1.732.265.500,00	1.696.294.225,00	2,12
Belanja Jasa	275.142.434,00	276.939.121,00	-0,65
Belanja Pemeliharaan	1.286.465.417,00	1.245.741.059,00	3,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.321.803.065,00	898.157.359,00	47,17
Jumlah Belanja Kotor	5.924.377.316,00	5.653.951.614,00	4,78
Pengembalian Belanja Barang	-1.490.000,00	-2.756.000,00	-45,94
Jumlah Belanja	5.922.887.316,00	5.651.195.614,00	4,81

- Belanja barang operasional terdiri dari pembelian N2 Cair dll.
- Belanja barang non operasional lainnya terdiri dari operasional padang penggembalaan, operasional perawatan kebun HPT, pengujian bahan baku pakan, distribusi bibit ternak, bahan promosi, optimalisasi pelayanan kunjungan, peningkatan daya tahan tubuh, konsumsi kegiatan BEKERJA, foto copy kegiatan BEKERJA, kegiatan OPAL, pembinaan SDM, pengamanan aset.
- Belanja barang persediaan terdiri dari pembelian pupuk, herbisida, bahan baku pakan ternak, ATK.
- Belanja jasa terdiri dari belanja jasa konsultan berupa jasa konsultasi terhadap perencanaan pemeliharaan kandang, perencanaan pemeliharaan jalan produksi, perencanaan pemeliharaan pagar pembatas paddock, Akreditasi ISO, jasa profesi berupa honor narasumber/pakar kegiatan ISO SMAP.
- Belanja pemeliharaan terdiri dari
 - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan: pemeliharaan tempat minum/pakan di lapangan, pagar paddock, kandang, saluran air kebun HPT, instalasi air, pagar kandang handling sapi pesisir, pagar pembatas antar paddock, sarana pendukung, drainase kandang,

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan hand mawer, traktor kecil, chopper, trailer pakan ternak, mesin spraying, mesin pupuk, traktor (TD 90), chain saw, peralatan bengkel, genset, rotaslasher, instalasi listrik, trailer tangki air, traktor besar, mixer pengaduk pakan, kendaraan roda 4 double kabin, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, komputer dan printer.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari
 - Perjalanan dinas biasa : pengawalan distribusi bibit ternak, pertemuan fungsional, koordinasi urusan kepegawaian, koordinasi penatausahaan BMN, pertemuan arsiparis, pendampingan kegiatan bekerja, verifikasi RTM dan operasionalnya, perjalanan dalam rangka koordinasi kesrawan, koordinasi dan perjalanan narasumber kegiatan ISO SMAP, pendampingan kegiatan strategis Kementan, workshop rivi RKAKL di Kanwil DJPb Padang, perjalanan dlm rangka penyelesaian SPM ke KPPN, Sinkronisasi PNBPN, LAKIP, SAKIP, workshop penyusunan lap keuangan SM I dan II, workshop penyusunan lap keuangan wilayah, menghadiri pameran.
 - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota terdiri dari pertemuan ISO SMAP,
 - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota : pelatihan administrasi pengadaan barang/jasa, perjalanan uji performance, workshop pra RKAKL, finalisasi Renja, Rakonteknas I dan II, koordinasi ke pusat, koordinasi pelaksanaan anggaran, apresiasi perbendaharaan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, perjalanan pertemuan monev PKH tahun 2019, workshop SAKIP.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 521.718.390,00. Realisasi belanja modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar 100% dari TA 2018. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pagu belanja modal TA 2019.

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 351.361.540,00.

B.5.1 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 170.356.850,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp140.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2019

Uraian	30 September 2019
Saldo Uang Persediaan	6.755.800,00
Kuitansi Uang Persediaan yang belum di SP2D kan	133.244.200,00
Jumlah	140.000.000,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.022.669.968,00 dan Rp1.838.456.435,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30 September 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	1.012.545.168,00	23.762.085,00
Suku Cadang	15.365.100,00	10.050.900,00
Bahan Baku	218.818.700,00	28.702.450,00
Persediaan Lainnya	1.775.941.000,00	1.775.941.000,00
Jumlah	3.022.669.968,00	1.838.456.435,00

- Barang konsumsi terdiri dari alat tulis, penjepit kertas, buku tulis, ordener dan map, penggaris, staples, alat tulis kantor lainnya, kertas HVS, berbagai kertas, bahan cetak lainnya, kabel listrik dan pakan hewan

- Suku cadang terdiri dari alat kedokteran lainnya seperti spuit eoroplek 10 ml, canul, spuit 20 cc, disposable syringe 5 cc dan 10 cc, pisau catter.
- Bahan baku terdiri dari bahan kimia padat seperti urea, TSP dan KCL, kawat seperti trigonal warna.
- Persediaan lainnya terdiri dari obat-obatan dan sapi yang berasal dari ternak turunan (Simmental dan Limousin).

Tabel Mutasi Persediaan

Uraian	Nilai	Ket
Persediaan Awal	1.838.456.435,00	
Mutasi Tambah	1.910.625.806,00	
Pembelian persediaan ditahun ini	1.732.265.500,00	
Pendapatan perolehan aset lainnya	-	
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	178.360.306,00	
Mutasi Kurang	726.412.273,00	
Beban penyesuaian nilai persediaan	21.830,00	
Beban persediaan konsumsi	719.984.893,00	
Beban persediaan suku cadang	61.800,00	
Beban persediaan bahan baku	6.343.750,00	
Beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	
Jumlah	3.022.669.968,00	

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp136.938.198.000,00 dan Rp136.938.198.000,00. Luas tanah yang dimiliki seluas 2.800.000 m² yang terletak di BPTU SP Padang Mengatas yang beralamat di jalan Padang Mengatas Kecamatan Luak. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.092.774.232,00 dan Rp 10.092.774.232,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.257.711.300,00 dan Rp24.752.361.300,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	24.752.361.300,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	60.000.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-554.650.000,00
Saldo per 30 September 2019	24.257.711.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2019	-2.743.953.888,00
Nilai Buku per 30 September 2019	21.513.757.412,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan adalah berupa:

1. Mutasi tambah berasal dari pengaktifan kembali gedung pos jaga pengamanan, karena sudah diperbaiki dan layak pakai.
2. Mutasi kurang karena berasal dari koreksi pencatatan yang diakibatkan dari double input, sesuai dengan surat Nomor 166/PC.220/F2.C/05/2016 berupa :
 - Nilai koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup semi permanen nup 3 Rp94.740.000,00
 - Nilai koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup permanen nup 2 Rp67.371.000,00
 - Nilai koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup semi permanen nup 5 Rp392.539.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.067.344.000,00 dan Rp11.067.344.000,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-12.597.014.803,00 dan Rp-10.902.174.601,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10.092.774.232,00	-7.252.409.080,00	2.840.365.152,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.257.711.300,00	-2.743.953.888,00	21.513.757.412,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.067.344.000,00	-227.256.391,00	10.840.087.609,00
Akumulasi Penyusutan		45.417.829.532,00	-12.597.014.803,00	32.820.814.729,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp326.123.000,00 dan Rp386.123.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTU SP Padang Mengatas serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	386.123.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-60.000.000,00
Saldo per 30 September 2019	326.123.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2019	-326.123.000,00
Nilai Buku per 30 September 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi kurang karena adanya pengaktifan kembali gedung pos jaga pengamanan, karena sudah diperbaiki dan layak pakai.

Sehingga aset lain-lain pada tahun 2019 terdiri dari:

- Mini Bus 2 unit
- Pick Up 1 unit
- Sepeda motor 7 unit
- Unit pengaduk 2 buah

- Papan Visual/papan nama 2 buah
- Kursi dorong 1 buah

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTU SP Padang Mengatas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-326.123.000,00 dan Rp-341.723.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	326.123.000,00	-326.123.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		326.123.000,00	-326.123.000,00	0,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.606.161,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTU SP Padang Mengatas per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30 September 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	1.315.320,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	6.290.841,00
Jumlah	0,00	7.606.161,00

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp140.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp172.781.682.697,00 dan Rp173.823.753.205,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.953.007.798,00 dan Rp 3.147.089.572,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	949.343,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	26.150.000,00	53.350.000,00	-50,98
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.923.726.000,00	3.089.438.000,00	-5,36
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.131.798,00	3.352.229,00	-6,58
Jumlah	2.953.007.798,00	3.147.089.572,00	-6,17

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan berasal dari penjualan ternak dan bibit rumput.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas.
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi berasal dari sewa mess dan aula.

Terdapat perbedaan jumlah pendapatan negara bukan pajak pada Laporan Operasional dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp134.861.890,00 karena adanya pendapatan dari kegiatan non operasional yaitu penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp185.000,00 dan pendapatan dari pemindahtanganan BMN (hasil pelelangan BMN) senilai Rp134.676.890,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.992.810.598,00 dan Rp3.875.786.078,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.793.621.820,00	2.639.901.800,00	5,82
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.179,00	40.322,00	-0,35
Beban Tunj. Anak PNS	74.320.380,00	71.842.278,00	3,45
Beban Tunj. Beras PNS	163.307.100,00	166.203.900,00	-1,74
Beban Tunj. Fungsional PNS	186.250.000,00	213.490.000,00	-12,76
Beban Tunj. PPh PNS	4.482.039,00	4.764.388,00	-5,93
Beban Tunj. Struktural PNS	37.620.000,00	37.620.000,00	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	234.166.080,00	235.565.390,00	-0,59
Beban Tunjangan Umum PNS	95.130.000,00	84.125.000,00	13,08
Beban Uang Lembur	0,00	22.195.000,00	-100,00
Beban Uang Makan PNS	403.873.000,00	400.038.000,00	0,96
Jumlah	3.992.810.598,00	3.875.786.078,00	3,02

Pada tahun 2019 ada penambahan jumlah pegawai berupa CPNS sebanyak 7 orang.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp726.328.643,00 dan Rp1.430.318.527,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	6.343.750,00	209.103.800,00	-96,97
Beban Persediaan konsumsi	719.984.893,00	1.122.484.727,00	-35,86
Beban persediaan lainnya	0,00	98.730.000,00	-100,00
Jumlah	726.328.643,00	1.430.318.527,00	-49,22

- Persediaan bahan baku terdiri atas bahan kimia padat (urea, TSP, KCL) dan kawat
- Persediaan konsumsi terdiri dari ATK seperti buku, kertas, staples, penggaris, map, dll, tinta/toner printer, pakan, dll.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.577.552.493,00 dan Rp1.813.188.971,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	397.060.450,00	829.002.500,00	-52,10
Beban Barang Non Operasional Lainnya	438.666.000,00	309.567.500,00	41,70
Beban Barang Operasional Lainnya	13.626.000,00	41.218.000,00	-66,94
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.140.000,00	72.320.000,00	97,93
Beban Honor Output Kegiatan	16.600.000,00	17.700.000,00	-6,21
Beban Jasa Konsultan	60.545.000,00	23.483.000,00	157,82
Beban Jasa Lainnya	65.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	23.040.000,00	106.230.000,00	-78,31
Beban Keperluan Perkantoran	294.457.450,00	261.173.350,00	12,74
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.318.991,00	65.417.593,00	7,49
Beban Langganan Listrik	43.380.445,00	44.900.852,00	-3,39
Beban Langganan Telepon	6.567.157,00	7.137.676,00	-7,99
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.151.000,00	5.838.500,00	-11,78
Beban Sewa	0,00	29.200.000,00	-100,00
Jumlah	1.577.552.493,00	1.813.188.971,00	-13,00

- Beban bahan terdiri dari peralatan kandang, peralatan pertanian ringan, peralatan petugas, tali hay baller, upah pemelihara ternak, atk dan foto copy kegiatan ISO SMAP.
- Beban barang non operasional lainnya terdiri dari operasional padang penggembalaan, operasional perawatan kebun HPT, pengujian bahan baku

pakan, distribusi bibit ternak, bahan promosi, optimalisasi pelayanan kunjungan, peningkatan daya tahan tubuh, konsumsi kegiatan BEKERJA, foto copy kegiatan BEKERJA, kegiatan OPAL, pembinaan SDM, pengamanan aset.

- Beban barang operasional terdiri dari pembelian N2 cair.
- Beban honor operasional satuan kerja terdiri dari honor KPA, PPSPM, PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, koordinator dan pelaksana SAK, koordinator dan pelaksana SIMAK, PPAPB, pengurus BMN dan staf pengelola keuangan.
- Beban honor output kegiatan terdiri dari honor Pantia ULP, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Beban jasa konsultan terdiri dari jasa konsultasi terhadap perencanaan pemeliharaan kandang, perencanaan pemeliharaan jalan produksi, perencanaan pemeliharaan pagar pembatas paddock.
- Beban jasa profesi terdiri dari honor narasumber/pakar kegiatan ISO SMAP.
- Beban keperluan perkantoran terdiri dari keperluan sehari - hari perkantoran, honor petugas satpam non PNS, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, pengadaan pakaian dinas pegawai, pengadaan pakaian satpam, THR PPNPM.
- beban langganan daya dan jasa lainnya terdiri dari langganan astinet dan speedy.
- beban langganan listrik
- beban langganan telepon
- beban pengiriman surat dinas pos pusat

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.286.527.217,00 dan Rp1.386.885.459,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	830.913.400,00	800.217.825,00	3,84

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.552.017,00	445.523.234,00	2,25
Beban Persediaan suku cadang	61.800,00	141.144.400,00	-99,96
Jumlah	1.286.527.217,00	1.386.885.459,00	-7,24

- Beban pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri dari pemeliharaan tempat minum/pakan di lapangan, saluran air kebun HPT, pagar paddock, kandang, instalasi air, pagar kandang handling sapi pesisir, pagar pembatas antar paddock, sarana pendukung,
- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan hand mawer, traktor kecil, chopper, trailer pakan ternak, mesin spraying, mesin pupuk, traktor (TD 90), chain saw, peralatan bengkel, genset, rotaslaser, instalasi listrik, trailer tangki air, traktor besar, mixer pengaduk pakan, kendaraan roda 4 double kabin, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, komputer dan printer.
- Beban Persediaan suku cadang

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.320.313.065,00 dan Rp 895.971.359,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.096.252.007,00	704.375.052,00	55,63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.880.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	212.181.058,00	191.596.307,00	10,74
Jumlah	1.320.313.065,00	895.971.359,00	47,36

- Beban perjalanan biasa terdiri dari pengawalan distribusi bibit ternak, pertemuan fungsional, koordinasi urusan kepegawaian, koordinasi penatausahaan BMN, pertemuan arsiparis, pendampingan kegiatan bekerja,

verifikasi RTM dan operasionalnya, perjalanan dalam rangka koordinasi kesrawan, koordinasi dan perjalanan narasumber kegiatan ISO SMAP, pendampingan kegiatan strategis Kementan, workshop riviw RKAKL di Kanwil DJPb Padang, perjalanan dlm rangka penyelesaian SPM ke KPPN, Sinkronisasi PNBP, LAKIP, SAKIP, workshop penyusunan lap keuangan SM I dan II, workshop penyusunan lap keuangan wilayah, menghadiri pameran.

- Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota terdiri dari pertemuan ISO SMAP.
- Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota terdiri dari pelatihan administrasi pengadaan barang/jasa, perjalanan uji performance, workshop pra RKAKL, finalisasi Renja, Rakonteknas I dan II, koordinasi ke pusat, koordinasi pelaksanaan anggaran, apresiasi perbendaharaan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, perjalanan pertemuan monev PKH tahun 2019, workshop SAKIP.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp236.500.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,00	236.500.000,00	-100,00
Jumlah	0,00	236.500.000,00	-100,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.779.496.620,00 dan Rp1.834.114.902,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	683.435.083,00	714.460.659,00	-4,34
Beban Penyusutan Irigasi	211.407.486,00	211.407.486,00	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	381.941.374,00	381.941.374,00	0
Beban Penyusutan Jaringan	11.187.117,00	11.187.000,00	0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	600.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	491.525.560,00	514.518.266,00	-4,47
Jumlah	1.779.496.620,00	1.834.114.902,00	-2,98

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-202.700,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-202.700,00	-100,00
Jumlah	0,00	-202.700,00	-100,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 September 2019 dan 30 September 2018

Uraian	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-21.830,00	-88.034.000,00	-99,98
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	178.360.306,00	63.514.804,00	180,82
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	2.008.500.000,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	134.676.890,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	200.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000,00	297,00	62.189,56
Jumlah	313.200.366,00	1.984.181.101,00	-84,22

- Terdapat beban penyesuaian nilai persediaan senilai Rp21.830,00 yang asalnya karena adanya nilai yang berbeda terhadap pembelian barang persediaan dengan jenis yang sama.
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berasal dari hasil pelelangan BMN milik BPTU SP Padang Mengatas.
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berasal dari potongan langsung SPM No.003/KU.130/F2.C/01/2019.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 dan 01 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp173.823.753.205,00 dan Rp174.440.025.474,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebesar Rp-7.416.820.472,00 dan Rp-6.341.291.923,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-454.393.582,00 dan Rp-2.218.545,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-454.393.582,00 dan Rp-2.218.545,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 30 September 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 September 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	100.256.418,00
Gedung dan Bangunan	-554.650.000,00
Jumlah	-454.393.582,00

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi berasal dari koreksi pencatatan karena double input terhadap gedung dan bangunan senilai Rp554.650.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup semi permanen nup 3 dengan nilai Rp94.740.000,00
- Koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup permanen nup 2 dengan nilai Rp67.371.000,00

- Koreksi pencatatan bangunan gudang tertutup semi permanen nup 5 dengan nilai Rp392.539.000,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.829.143.546,00 dan Rp6.860.871.113,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 September 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 September 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.917.013.234,00
Diterima dari Entitas Lain	-3.087.869.688,00
Jumlah	6.829.143.546,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 September 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-3.087.869.688,00 sedangkan DKEL sebesar Rp9.917.013.234,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp172.781.682.697,00 dan Rp174.957.386.119,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Untuk kegiatan BEKERJA, setelah tanggal berakhirnya periode penyusunan laporan keuangan Triwulan III, prosesnya telah sampai pada persiapan penandatanganan kontrak untuk ayam, pakan dan obat-obatan. Pencairan biaya bantuan untuk kandang akan direalisasikan di bulan Oktober 2019.
2. Pada bulan September telah dilakukan lelang terhadap beberapa BMN pada BPTU SP Padang Mengatas, namun Surat Keputusan untuk penghapusan BMN masih dalam proses. Berikut adalah daftar BMN yang dilelang :

No	Uraian Barang	NUP	Kondisi	Keterangan	Nilai Limit
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	rusak berat	Merk Kijang Grand Lux Long AT, tahun pembuatan 2003, nomor polisi BA 1546 C, nomor rangka MHF11UF8130033591, nomor mesin 1RZ7033624, Nomor STNK 06461899, Nomor BPKB 4730305	18.909.000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	rusak berat	Merk Toyota Kijang KF 80 Long, tahun pembuatan 1999, nomor polisi BA 53 C, nomor rangka MHF11KF8000047838, nomor mesin 7K0248945, nomor STNK 0152815, nomor BPKB 8575720	16.725.000
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	rusak berat	Merk Toyota Kijang Standard LF 60/Pick Up, tahun pembuatan 2000, nomor polisi BA 9997 C, nomor rangka MHF31LF60Y0003972, nomor mesin 2L9631121, nomor STNK 13851848, nomor BPKB 8908909	12.276.000
4	Sepeda Motor	1	rusak berat	Merk Honda GL PRO, tahun pembuatan 1997, nomor polisi BA 4215 C, nomor rangka MH1WAB00VVK067398, nomor mesin WABE1066836, nomor STNK 16114081, nomor BPKB 6238263	874.300
5	Sepeda Motor	4	rusak berat	Merk Suzuki Shogun, tahun pembuatan 2002, nomor polisi BA 6163 M, nomor rangka MH8FD110X2J866840, nomor mesin E1091D872186, nomor STNK 07003417, nomor BPKB 1896033	716.310
6	Sepeda Motor	6	rusak berat	Merk Suzuki TS 125 ER, tahun pembuatan 2002, nomor polisi BA 6165 MZ, nomor rangka MH8TS125E2J122194, nomor mesin F103ID122285, nomor STNK 0087584, no BPKB 1896461	583.800
7	Sepeda Motor	7	rusak berat	Merk Suzuki TS 125 ER, tahun pembuatan 2002, nomor polisi BA 6164 MZ, nomor rangka MH8TS125E2J-122182, nomor mesin	264.900

				F103-ID-122307, nomor STNK 0087582, nomor BPKB 1896459	
8	Sepeda Motor	8	rusak berat	Merk Suzuki Shogun, tahun pembuatan 2002, nomor polisi BA 6162 M, nomor rangka MH8FD110X2J866782, nomor mesin E109ID872194, nomor STNK 07003418, nomor BPKB 1896032	710.370
9	Sepeda Motor	9	rusak berat	Merk Honda Astrea C100, tahun pembuatan 1997, nomor polisi BA 6993 C, nomor rangka MH1NFG00VVK672875, nomor mesin NFGE1676399, nomo STNK 16114082, nomor BPKB 6238265	637.500
10	Sepeda Motor	14	rusak berat	Merk Honda Astrea C100, tahun pembuatan 1997, nomor polisi BA 6981 C, nomor rangka MH1NFG00VVK652635, nomor mesin NFGE1647283, nomor STNK 16114083, nomor BPKB 6238264	624.500
					52.321.680